

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DALAM PILKADA KOTA PADANG
PADA TAHUN 2013**

Andika Dirsa¹, Nurharmi¹, Hendrizal¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta
E-mail: dirsa_andika@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Padang pada tahun 2013. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat saat pemungutan suara, seperti: memilih karena kesadaran politik masyarakat tinggi, hubungan emosional, dan diberi uang atau honor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Padang pada tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat adalah partisipasi yang masih dimobilisasi dan masih rendahnya kesadaran politik masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mempengaruhi masyarakat pada saat pemungutan suara adalah faktor hubungan emosional, faktor uang dan status sosial yang dimiliki seseorang dapat berpengaruh; begitu juga halnya dengan keikutsertaan masyarakat untuk pergi kampanye, faktor uang juga dapat mempengaruhi sehingga masyarakat untuk kampanye mudah dimobilisasi. Namun untuk keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik lebih pada motif kepentingan pribadi atau kelompok seperti satu partai, satu organisasi, satu daerah asal atau pernah kenal dengan calon tetapi ada juga faktor uang yang dapat mempengaruhinya.

Kata kunci: faktor-faktor, partisipasi politik, Pilkada, Kota Padang.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan berdemokrasi telah mewarnai perpolitikan di Indonesia. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan sebutan demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil-wakil itu dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan.

Di Indonesia, pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi itu sendiri turut mengikutsertakan kualitas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang disalurkan melalui wadah partai politik, serta kekuatan sosial politik yang dibawa kepada muara pemilihan

dan penetapan perwakilan politiknya. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud demokrasi di tingkat daerah yang menentukan berjalannya pemerintahan di daerah tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan sebuah jaminan perbaikan kualitas kepemimpinan di suatu daerah. Momentum Pilkada secara langsung juga sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pilkada secara langsung harus sesuai dengan prinsip pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam

satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Proses Pilkada secara langsung ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang kemudian bertanggung jawab kepada DPRD. Sesuai dengan pasal 57 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan:

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung, partisipasi politik adalah hal yang mempengaruhi sistem politik dalam sebuah negara yang demokratis, karena sistem politik yang demokratis tidak ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam partisipasinya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Partisipasi menjadi penting karena dapat memberikan suatu legitimasi bagi kekuasaan politik seseorang atau kelompok (partai politik). Menurut Adams (dalam Miaz, 2012:20-21),

Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.

Partisipasi politik masyarakat merupakan perangkat penting karena

teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki. Pengertian partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan masyarakat dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*), kegiatan yang mencakup tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik dan kelompok kepentingan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang pada hari Senin 5 November 2014 akhirnya memutuskan Pilkada Kota Padang berlangsung dua putaran. Ini disebabkan tidak ada satu pasangan calon yang mampu mencapai suara 30% tambah 1 suara. Pemuncak pada putaran ini diraih oleh pasangan nomor urut 10 Mahyeldi-Emzalmi dengan

perolehan 92.214 suara atau hanya 29,48% dari total suara sah. Sedangkan di posisi kedua disusul oleh pasangan nomor urut 3 Desri Ayunda-James Heliward, melalui jalur independen mampu memposisikan diri peraih suara terbanyak kedua sebanyak 59.845 suara atau 19,11%. Total suara sah Pilkada Kota Padang putaran pertama ini adalah 313.146 suara dari total pemilih menggunakan hak suara 323.542 orang. Sebanyak 10.448 suara dinyatakan tidak sah. Sedangkan pemilih yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sebanyak 561.189.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekapitulasi suara sidang pleno KPU Kota Padang atas pemilihan walikota putaran kedua, pasangan Mahyeldi-Emzalmi unggul dengan perolehan suara 148.854 atau 50,29%, sedangkan pasangan Desri Ayunda-James Helyward memperoleh 147.166 suara. Partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Padang putaran kedua pada 5 Maret 2014 lalu terbilang rendah, yakni hanya 300.227 pemilih atau

53,6%. Padahal pada putaran pertama, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, mencapai 57,7% partisipasi pemilih.

Fenomena banyaknya angka Golput pada pemilu di Kota Padang adalah salah satu bukti bahwa masih rendahnya partisipasi politik masyarakat. Realitas dan fenomena rendahnya partisipasi politik ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun, masyarakat yang telah diberi hak pilihnya tersebut justru tidak mau menggunakan hak pilihnya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Narbuko dan Achmadi (2012:44), “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi”.

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Menurut Komaruddin (dalam Mardalis, 2014:53), “Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa.”

Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan peneliti maka penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasi. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling* yang dilakukan secara acak atau random tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Ini memungkinkan setiap individu berpeluang untuk menjadi sampel penelitian, dengan cara randomisasi atau dengan cara melalui undian. Dengan demikian, maka sampel yang diambil oleh peneliti adalah dengan mengambil dua kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Kecamatan Koto

Tengah dan Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji. Dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 140 orang dengan masing-masing kelurahan sebanyak 70 sampel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau informan dengan cara tanya jawab secara lisan.

2. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat atau berlangsungnya peristiwa.

3. Angket (*Kuesioner*)

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan angket kepada masyarakat Kota Padang yang menjadi responden dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang berupa catatan literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang ada di lapangan terkait dengan sikap dan faktor masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara saat Pilkada Kota Padang pada tahun 2013 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah dan Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji. Hasil analisis kuesioner/angket tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah dan Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji sebagai berikut:

1. Memiliki Pengetahuan Terhadap Visi dan Misi

Berikut tabel persentase masyarakat yang memilih karena memiliki pengetahuan terhadap visi dan misi calon yang dipilih.

Tabel 12: Persentase Pemilih Karena Memiliki Pengetahuan terhadap Visi dan Misi Calon yang Dipilih

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	46	32,85%
2	Tidak	94	67,15%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang memilih karena memiliki pengetahuan terhadap visi dan misi calon yang dipilih, sebanyak 46 orang (32,85%) menyatakan “ya”, sedangkan 94 orang (67,15%) menyatakan “tidak”.

2. Memiliki Pengetahuan Terhadap Pasangan Calon

Berikut tabel persentase masyarakat yang memilih karena memiliki pengetahuan terhadap pasangan calon.

Tabel 13: Persentase Pemilih Karena Memiliki Pengetahuan terhadap Pasangan Calon

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	33	23,58%
2	Tidak	107	76,42%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang memilih karena memiliki pengetahuan terhadap pasangan calon yang dipilih, sebanyak 33 orang (23,58%) menyatakan “ya”, sedangkan 107 orang (76,42%) menyatakan “tidak”.

3. Memiliki Minat Menjadi Tim Sukses.

Berikut tabel persentase partisipasi masyarakat yang memiliki minat menjadi tim sukses.

Tabel 14: Persentase partisipasi masyarakat yang memiliki minat menjadi tim sukses

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	30	21,42%
2	Tidak	110	78,57%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa persentase partisipasi masyarakat yang memiliki minat menjadi tim sukses, sebanyak 30 orang (21,42%) menyatakan “ya”, sedangkan 110 orang (78,57%) menyatakan “tidak”.

4. Mengikuti Kegiatan Kampanye Politik

Berikut tabel persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye politik.

Tabel 15: Persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye politik.

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	24	17,15%
2	Tidak	116	82,85%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye politik., sebanyak 24 orang (17,15%) menyatakan “ya”, sedangkan 116 orang (82,85%) menyatakan “tidak”.

5. Memilih Karena Kesadaran atas Kehendak Sendiri

Berikut tabel persentase masyarakat yang memilih karena kesadaran atas kehendak sendiri.

Tabel 16: Memilih Karena Kesadaran atas Kehendak Sendiri

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	35	25%
2	Tidak	105	75%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang memilih karena kesadaran atas kehendak sendiri adalah 35 orang (25%) menyatakan “ya”,

sedangkan 105 orang (75%) menyatakan “tidak”.

6. Memilih Karena Ada Hubungan Emosional

Berikut tabel persentase masyarakat yang memilih karena faktor hubungan emosional.

Tabel 17: Memilih Karena Ada Hubungan Emosional, seperti Keluarga, Satu Daerah, Satu Partai, Budaya dan Agama

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	115	82,14%
2	Tidak	25	17,85%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang memilih karena hubungan emosional adalah 115 orang (82,14%) menyatakan “ya”, sedangkan 25 orang (17,85%) menyatakan “tidak”.

7. Memilih Karena Faktor Diberi Uang atau Honor

Berikut tabel persentase masyarakat yang memilih karena faktor diberi uang atau honor.

Tabel 18: Memilih Karena Faktor Diberi Uang atau Honor

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	17	12,15 %
2	Tidak	123	87,85%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang memilih karena faktor diberi uang atau honor adalah 17 orang (12,15%) menyatakan “ya”, sedangkan 123 orang (87,85%) menyatakan “tidak”.

8. Memilih Karena Dorongan Keluarga atau Diajak Teman

Berikut tabel persentase masyarakat yang memilih karena faktor dorongan keluarga atau diajak teman.

Tabel 19: Memilih Karena Dorongan Keluarga atau Diajak Teman

No.	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	55	39,29%
2	Tidak	85	60,71%
	Jumlah	140	100%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang memilih karena dorongan keluarga atau diajak teman adalah 55 orang (39,29%) menyatakan “ya”, sedangkan 85 orang (60,71%) menyatakan “tidak”.

Jadi dari hasil kuesioner di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Padang bisa dikatakan masyarakat yang memiliki berbagai faktor untuk memilih pada saat Pilkada Kota Padang tahun 2013.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Padang pada tahun 2013, dapat

disimpulkan bahwa dalam pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota Padang 2013 yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara atau *voting* adalah persentase masyarakat yang memilih karena memiliki pengetahuan terhadap visi dan misi calon yang dipilih, sebanyak 46 orang (32,85%) menyatakan “ya”, sedangkan 94 orang (67,15%) menyatakan “tidak”. Memiliki pengetahuan terhadap pasangan calon yang dipilih, sebanyak 33 orang (23,58%) menyatakan “ya”, sedangkan 107 orang (76,42%) menyatakan “tidak”. Memiliki minat menjadi tim sukses, sebanyak 30 orang (21,42%) menyatakan “ya”, sedangkan 110 orang (78,57%) menyatakan “tidak”. Mengikuti kegiatan kampanye politik., sebanyak 24 orang (17,15%) menyatakan “ya”, sedangkan 116 orang (82,85%) menyatakan “tidak”. Memilih karena kesadaran atas kehendak sendiri adalah 35 orang (25%) menyatakan “ya”, sedangkan 105 orang (75%) menyatakan “tidak”. Memilih karena hubungan emosional adalah 115 orang (82,14%) menyatakan “ya”, sedangkan 25 orang (17,85%) menyatakan “tidak”. Memilih karena faktor diberi uang atau honor adalah 17 orang (12,15%) menyatakan “ya”, sedangkan 123 orang (87,85%) menyatakan “tidak”. Memilih karena dorongan keluarga

atau diajak teman adalah 55 orang (39,29%) menyatakan “ya”, sedangkan 85 orang (60,71%) menyatakan “tidak”.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Fachri. 2012. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Padang: UNP Press.
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hakum, M. Arief. 2015. *Kiat Menulis Artikel di Media*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Komarudin dan Junidar Hasan. 2003. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nursi, M. 2008. *Ilmu Politik Suatu Pengantar*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Pribadi, Toto, dkk. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.